



# PENGELOLAAN KONSERVASI DI TANAH PAPUA

Jakarta, 16 September 2021

# KONDISI UMUM PENGELOLAAN KSDAE DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

1

Berdasarkan aspek filosofis, historis dan sosiologis, maka keberadaan kelompok masyarakat adat di dalam KK menjadi bagian integral dari pengelolaan KK di Tanah Papua. Kearifan local sebagai kekuatan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi.

2

Jumlah SDM tidak sebanding dengan luas Kawasan yang dikelola, perbandingan ASN dengan luas wilayah 9 juta hektar, maka seorang ASN di Papua bertanggung jawab atas 16.900 Ha. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, telah direkrut 490 orang MMP/MPA sehingga seorang petugas menjaga kawasan hutan 9.200 Ha.

3

Pengawasan dan pengendalian TSL di Papua bersinergi dengan lintas sectoral. Khususnya CIQ (Custom, Imigration and Quarantine) di bandara dan pelabuhan.

# KONDISI UMUM PENGELOLAAN KSDAE DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

4

Masyarakat Papua secara turun-temurun sudah menjaga Kawasan Konservasi karena konsep 3P dalam UU No. 5 Tahun 1990 sesuai dengan kearifan lokal masyarakat asli.

5

Jenis invasif & alien spesies dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yg didahului kajian ilmiah.

Contoh : Rusa timor ditetapkan sebagai satwa buru untuk dimanfaatkan di Papua.

**LUAS TOTAL KAWASAN KONSERVASI DI  
PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

**9.946.656 HA**

**JUMLAH PNS DAN PPNPN  
DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

**588 orang**

**9.946.656 HA**

---

**588 orang**

**=16.916 HA/ORG**

**JUMLAH MMP DAN MPA  
DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

**490 ORANG**

**9.946.656 HA**

---

**1078 orang**

**=9.226 HA/ORG**

# PENGLOLAAN KAWASAN KONSERVASI DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI MULAI DARI HULU SAMPAI HILIR.

## Role Model TN Lorentz : (dimulai pada 2018-sekarang)

Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat Papua

(# Jalur Penelusuran Alam Melintasi 21 Tipe Ekosistem (elevasi : 0 – 4884 mdpl)  
Melewati Kampung Tradisional Masyarakat Adat (Anim Ha-Mee Pago & La Pago)  
dimulai dari Laut Arafura & pulau Yapero)-Pantai/Kp. Ohotya-Sungai Otakwa  
(ekosistem Mangrove)-Pegunungan Tengah Papua

**Yellow valley**  
Carstentz/Nggapulu/  
Menangkawi/Mpaigesani

**Jembatan gantung/Trail**  
#Savana menyebrangan

**Desa Beanegom**  
#sisi selatan Carstentz

Sarana Helipad  
#Kampung Beane

Home stay milik masyarakat

Pendakian ke Carstentz

**Meramu**  
Pati Sagu

**Desa Ohotya**  
#Pesisir /Muara Sungai

Kampung Ohotya

Sunset di pulau Yapero

Persinggahan Burung Migran  
# burung Pelikan dari Australia

**Alpine Zone**  
(> 3.200 m)

**Montane Zone**  
(650 – 3.200 m)

**Lowland Zone**  
(0 – 650 mdpl)

Alpine Snow  
Rain and snow  
Carstentz Pyramid  
(4884 mdpl)  
Apine Scrub  
Barerock Tributary  
Hill Forest  
Peat Swamp  
Peat Forest  
Delta  
Deposited sediment  
Ocean

**Desa/Kampung Beane**  
2

**Desa Ohotya**  
1

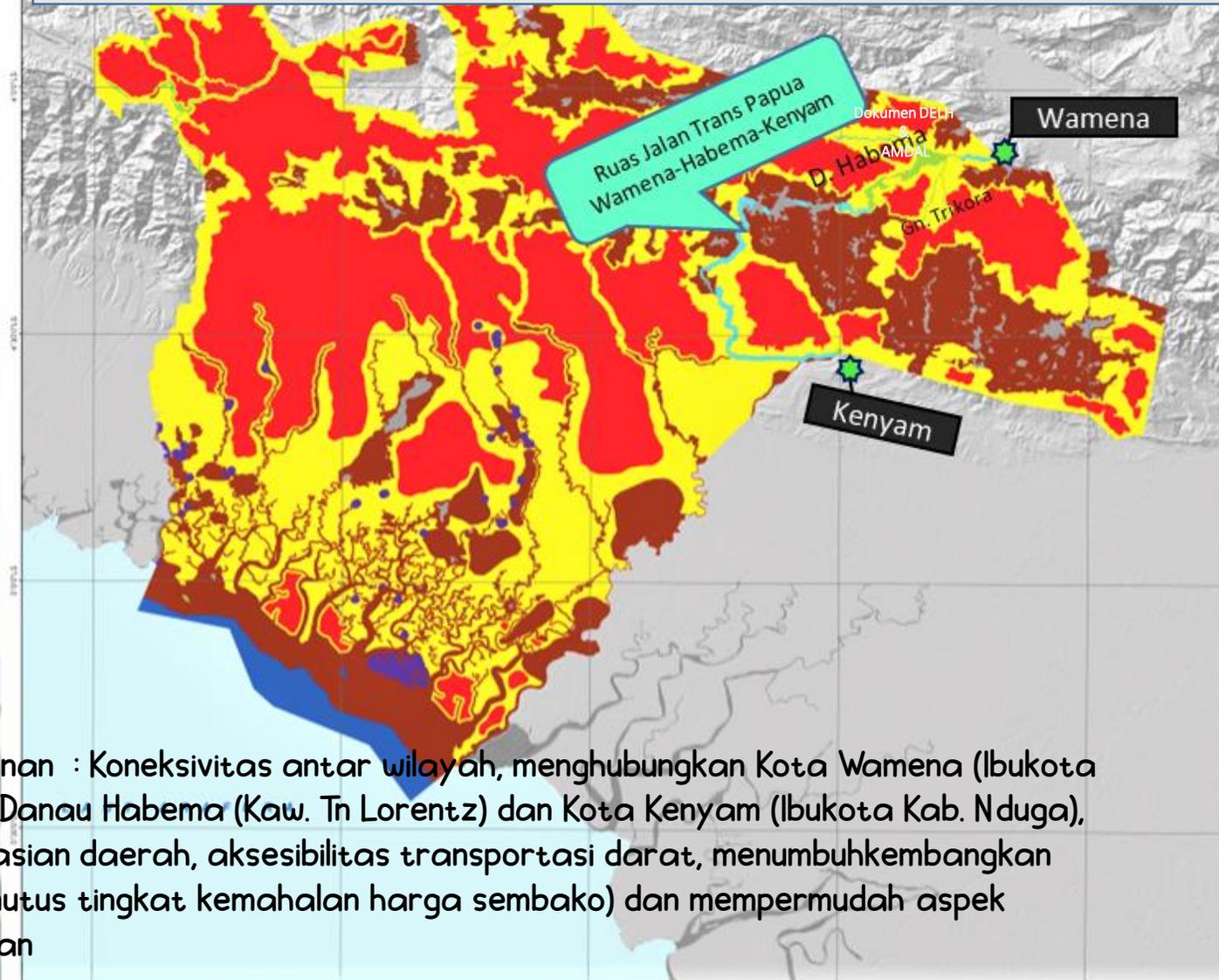
Transition areas

Kampung Beane & Dolino

TAMAN NASIONAL  
**LORENTZ**  
NATIONAL PARK

# PEMBANGUNAN JALAN POROS TRANS PAPUA MELINTASI KAWASAN TAMAN NASIONAL LORENTZ

Proyek Sekmen V Provinsi Papua : WAMENA – HABEMA – KENYAM  
( Panjang ± 176 km )



Manfaat Pembangunan : Konektivitas antar wilayah, menghubungkan Kota Wamena (Ibukota Kab. Jayawijaya) - Danau Habema (Kaw. Tn Lorentz) dan Kota Kenyam (Ibukota Kab. Nduga), membuka keterisolasian daerah, aksesibilitas transportasi darat, menumbuhkembangkan perekonomian (memutus tingkat kemahalan harga sembako) dan mempermudah aspek pengelolaan kawasan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
NOMOR SK.480/DIRJENKONSERVASI/2018 Tanggal 18 Desember 2018  
TANGGAL 18 Desember 2018

## PETA PENATAAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LORENTZ PROVINSI PAPUA

SKALA 1 : 500 000



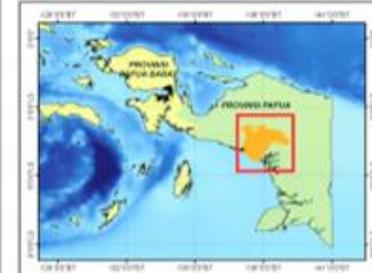
### KETERANGAN:

Sumber : 1. Peta Peraturan Indonesia skala 1 : 50 000  
2. Peta Lorentz SK.480/DIRJENKONSERVASI/2018 Tanggal 17 Juni 2014  
3. Peta RTM Provinsi Papua 2013 - 2033

### Legenda

#### Zona Pengelolaan:

- Inti ; Luasan 823.190,35 ha (35,05 %)
- Rimba ; Luasan 842.461,94 ha (35,87 %)
- Perlindungan Bahari ; Luasan 41.372,28 ha (1,76 %)
- Pemanfaatan ; Luasan 10.176,2 ha (0,43 %)
- Tradisional ; Luasan 559.089,84 ha (23,81 %)
- Rehabilitasi ; Luasan 10.973,78 ha (0,47 %)
- Religi, Budaya dan Sejarah ; Luasan 17.704,77 ha (0,75 %)
- Khusus ; Luasan 43.714,15 ha (1,86 %)



PETA LOKASI  
SKALA 1 : 12 500 000

### DISUSUN OLEH:

Di Wamena, Papua  
Tanggal : 22 Oktober 2018

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ

Alpha Anis Sulisty, S.Pd., M.P.  
NIP. 19700517 200903 1 007

### DIBAHKAN OLEH:

Di Jakarta  
Tanggal : 18 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
DAN EKOSISTEM

H. Heryanto, M.Sc.  
NIP. 196205 198003 1 303

### DINILAI OLEH:

Di Jakarta  
Tanggal : 22 November 2018

DIREKTUR PENYELAAAN DAN INFORMASI  
KONSERVASI ALAM

H. Lidya Kusumawardhani, M.Sc.  
NIP. 198505 198501 2 001



SELURUH TRASE JALAN TRANS PAPUA BERADA PADA  
**ZONA KHUSUS** KAWASAN **TAMAN NASIONAL LORENTZ**



# Pengelolaan TNTC tetap memperhatikan tipe ekosistem di kawasan yaitu:

Hutan Tropis  
Daratan/Pulau



Hutan Mangrove



Terumbu Karang



Hutan Pantai



Padang Lamun

Telah dibentuk 93 kelompok masyarakat dalam bentuk desa binaan dan kemitraan konservasi di tanah Papua.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelestarian Cenderawasih melalui Pembuatan mahkota cenderawasih imitasi sebagai pengganti mahkota Cenderawasih asli. Pada kesempatan ini kami mohon dukungan Ketua Komisi IV Dan anggota dewan Yang Terhormat turut mendukung penggunaan mahkota Cenderawasih imitasi sebagai bentuk perlindungan Cenderawasih asli yang Merupakan mascot PON XX Tahun 2021.



Selain itu, terdapat budidaya anggrek, pertanian organic, pembuatan sirup dari mangrove, kerajinan patung cenderawasih, pahatan souvenir, madu wamena, abon gastor, madu trigona, minyak kayu putih dan teh' celup sarang semut.



Telah dilakukan translokasi satwa endemik Papua dari berbagai wilayah dan dilakukan pelepasliaran ke habitat alaminya.



Pelepasliaran Satwa Endemik Papua Hasil Penyelamatan dan Rehabilitasi

# UU Nomor 5 Tahun 1990 : PELUANG, TANTANGAN & SOLUSI PELAKSANAAN 3P (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Secara Lestari SDAH DAN EKOSISTEMNYA

Pembelajaran dari pengelolaan kk tingkat tapak di Papua

1

Menurut hemat kami, UU No. 5/1990 tentang KSDAH&E masih relevan mendukung konservasi di Tanah Papua, sebagaimana Pasal 5, 8, 16, 17, 29, 31, 32, 35 & 37, memungkinkan masyarakat adat/lokal/setempat yang berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi untuk memperoleh akses memanfaatkan SDA Hayati sesuai kearifan budaya lokal/setempat, khususnya di TN & TWA, namun perlu penguatan agar dapat juga dilakukan di CA & SM khususnya oleh masyarakat adat dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam implementasinya.

Memperhatikan pasal 18, 18A & 18B UUD 1945, serta merujuk pasal 67 UU No. 41/1999 tentang kehutanan yang selaras dengan pasal 43 dan Pasal 63 UU No. 21/2001 jo UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, sebagaimana konsep Paradigma/10 Cara Baru Kelola KK Lingkup Ditjen KSDAE, maka diperlukan pengaturan pola/struktur ruang blok tradisonal, blok religi/budaya-sejarah sebagai ruang masyarakat adat dalam menunjang aspek 3P dlm pengelolaan KK di Provinsi Papua.

## UU NOMOR 5 TAHUN 1990 : PELUANG, TANTANGAN & SOLUSI PELAKSANAAN 3P (PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN SECARA LESTARI SDAH DAN EKOSISTEMNYA PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN KK TINGKAT TAPAK DI PAPUA

2

Pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan dan pendampingan desa/kelompok masyarakat di dalam dan sekitar KK terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas & peranserta masyarakat, namun perlu ditingkankan dalam pengalokasian anggaran karena pagu indikatif yang belum optimal.

Perlu didorong menjadi program prioritas nasional dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pembiayaan program pemberdayaan masyarakat (khususnya masyarakat adat) di dalam dan sekitar kawasan konservasi, termasuk kewajiban dan / atau memberi ruang kewenangan kepada pemerintah daerah (provinsi & kabupaten/kota) mengalokasikan melalui alokasi dana otonomi khusus Provinsi Papua

## UU NOMOR 5 TAHUN 1990 : PELUANG, TANTANGAN & SOLUSI PELAKSANAAN 3P (PERLINDUNGAN, PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN SECARA LESTARI SDAH DAN EKOSISTEMNYA PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN KK TINGKAT TAPAK DI PAPUA

3

Tantangan kita masih adanya peredaran TSL illegal yang keluar dan masuk wilayah Papua/ Papua barat, karena kekurangan SDM dan keterbatasan kewenangan di bandara/pelabuhan.

Memberikan dan mempertegas mandate KSDA sebagai bagian dari otoritas konservasi di wilayah pelabuhan/ bandara dan wilayah lalu lintas keluar masuk kewilayahan yang selama ini hanya kewenangan oleh CIQ (custom, imigration, and Quarantine).

Perlu adanya pidana tambahan berupa tanggung jawab biaya pengembalian satwa ke habitatnya bagi pelaku illegal TSL dan pemulihan ekosistem.



TERIMA KASIH